Paragraf 4

Pemimpin

Pasal 36

1. Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNAND;
2. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin terdiri atas unsur:
   1. pimpinan;
   2. pelaksana akademik;
   3. penunjang akademik dan non-akademik;
   4. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
   5. pelaksana administrasi;
   6. pengawasan internal;
   7. penjaminan mutu;
   8. pengelola usaha; dan
   9. unsur lain yang diperlukan

Pasal 37

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri atas:

1. Rektor; dan
2. Wakil Rektor.

Pasal 38

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

1. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
2. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana kegiatan serta anggaran tahunan;
3. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
5. mengangkat dan memberhentikan pegawai non pegawai negeri sipil UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNAND secara optimal;
7. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
8. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan fakultas/sekolah, departemen, dan/atau program studi dengan persetujuan SA;
9. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
10. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri ~~Guru Besar~~ setelah mendapat persetujuan SA;
11. memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya;
12. ~~mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan UNAND;~~
13. menyusun dan menetapkan kode etik dosen, ~~tenaga kependidikan~~ dan mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SA;
14. menyusun dan menetapkan kode etik tenaga kependidikan;
15. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan mahasiswa ~~sivitas akademika~~ ~~dan tenaga kependidikan~~ yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/ atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SA;
16. menjatuhkan sanksi kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/ atau peraturan perundang-undangan;
17. membina dan mengembangkan karier dosen dan tenaga kependidikan;
18. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNAND atau perubahan Statuta UNAND bersama dengan MWA dan SA;
19. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan
20. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ~~yang ditetapkan dengan Peraturan MWA~~.

Pasal 39

Persyaratan untuk menjadi Rektor ~~sebagai berikut~~:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. ~~memiliki~~ berkewarganegaraan Indonesia;
3. memiliki gelar akademik Doktor (S3) ~~dan~~ ~~memiliki~~ ~~jabatan akademik paling rendah lektor kepala~~ yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
4. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
6. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
7. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. memiliki integritas, komitmen dan kompetensi manajerial untuk pengembagan UNAND ~~diri yang baik~~;
9. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNAND;
10. memahami sistem pendidikan tinggi ~~UNAND dan~~ nasional;
11. ~~memiliki kompetensi manajerial;~~
12. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan ~~akademik~~ yang baik;
13. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis; dan
14. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
15. bagi calon yang berasal dari luar UNAND, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan rektor dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 40

1. Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA.
2. Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
3. Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. ~~Pemilihan Rektor dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.~~
5. ~~Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pemilihan Rektor dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara.~~
6. ~~Pemilihan Rektor oleh MWA harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.~~
7. ~~MWA menetapkan dan melantik Rektor pada akhir masa jabatan Rektor sebelumnya.~~
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, ~~penetapan~~, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan ~~dalam~~ Peraturan MWA.

Pasal 41

Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

1. organ lain di lingkungan UNAND;
2. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
4. badan usaha di dalam maupun di luar UNAND; atau
5. institusi lain yang dapat menimbulkan konflik ~~pertentangan~~ kepentingan dengan ~~kepentingan~~ UNAND.

Pasal 42

1. Rektor ~~berakhir~~ berhenti dari jabatannya apabila:

~~a. meninggal dunia~~;

1. berakhir masa jabatannya;
2. berhalangan tetap; ~~secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan~~;
3. mengundurkan diri;
4. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
5. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
6. melanggar kode etik UNAND; atau
7. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
9. meninggal dunia;
10. sakit yang tidak dapat disembuhkan selama 6 (enam) bulan secara terus menerus yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan berita acara tim penguji kesehatan pemerintah;
11. ~~Pemberhentian Rektor dilakukan oleh MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.~~

Pasal 43

1 Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, maka salah satu wakil Rektor diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang diberhentikan.

1. Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, MWA mengangkat salah satu wakil rektor menjadi rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan rektor.

2 Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebelumya dan dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan. catatan: apakah tidak 2 tahun?

1. Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 39
2. Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan rektor sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 44

1. Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
2. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

1. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
3. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang wakil Rektor, tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Fakultas;

b. Sekolah Pascasarjana; dan

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 47

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri atas:

1. Dekan dan Wakil Dekan;
2. senat fakultas;
3. departemen ~~program studi~~; dan
4. laboratorium/bengkel/studio.

Pasal 48

1. Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
4. Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
5. Pedoman tentang syarat, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

1. Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Fakultas memiliki wewenang:
3. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan fakultas;
4. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. memberikan masukan kepada pimpinan fakultas dalam penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis ~~serta rencana kerja dan anggaran tahunan~~ fakultas;
6. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
7. memberikan pertimbangan ~~persetujuan~~ untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen;
8. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu program studi;
9. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi fakultas; dan
10. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika di fakultas.
11. Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
12. ~~Persyaratan dan tata cara pemilihan~~ Ketentuan mengenai ~~keanggotaan~~ senat fakultas ~~selanjutnya~~ diatur dengan Peraturan Rektor. ~~setelah mendapat persetujuan SA~~.

Pasal 50

1. Sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
2. Sekolah pascasarjana terdiri atas:

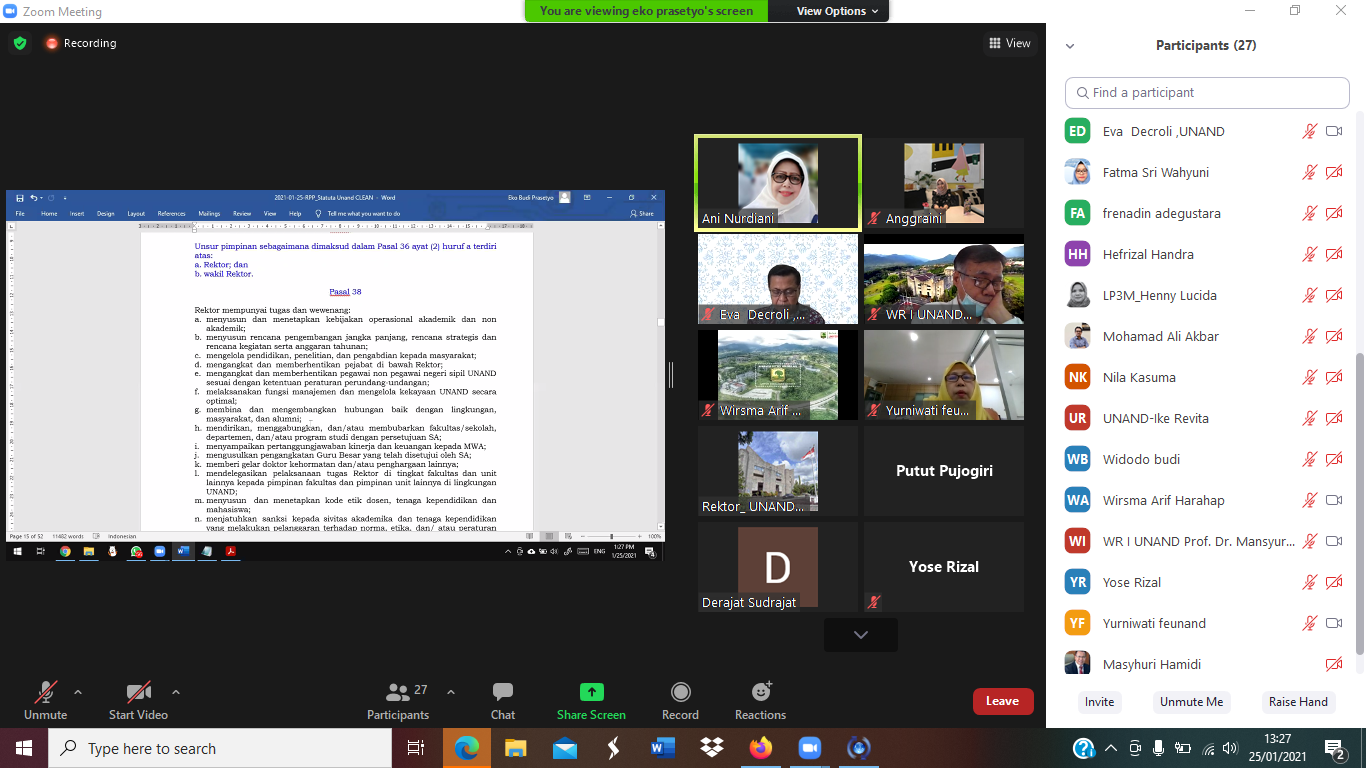
Direktur;

Wakil Direktur; dan

Program Studi.

1. Masa jabatan direktur sekolah pascasarjana dan wakil direktur sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Direktur sekolah pascasarjana dan wakil direktur sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketentuan mengenai Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

**=============25/01/21 jam 18.00=============**

****